



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Juli 2016

Nomor : 2061/D.1/SPPT.05.5

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan

Kepada Yth. :

( *Daftar Terlampir* )

di

Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) Nomor B/2334/M.PANRB/6/2016, Tanggal 27 Juni 2016, perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK). Dengan ini kami sampaikan bahwa Persetujuan Men PANRB atas usulan Kepala LAN perihal Penetapan Kelas Jabatan JFAK tersebut sesuai dengan Permen PANRB No. 39/2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Permen PANRB No. 34/2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Berdasarkan hal tersebut penetapan kelas JFAK seperti terlampir.

Demikian untuk dapat dipegunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Plt. Deputi Bidag Kajian Kebijakan  
Lembaga Administrasi Negara,



Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA

Tembusan :

Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara.



LAN

**Kepada Yth.**

1. Sekjen DPRI RI;
2. Sekjen Kementerian Sosial;
3. Sekjen Kementerian Kesehatan;
4. Sekjen Kementerian Kominfo;
5. Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan;
6. Sekjen Kementerian Agama;
7. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara;
8. Sekretaris Utama Badan POM;
9. Sekretaris Utama BPPT;
10. Sekjen Komnas HAM
11. Sekda Kabupaten Tangerang;
12. Sekda Kabupaten Sukabumi;
13. Sekda Kabupaten Garut;
14. Sekda Kabupaten Salatiga;
15. Sekda Pemerintah Kota Yogyakarta.

*LAMPIRAN*

**KELAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>UNIT ORGANISASI</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
(1)	(2)	(2)	(3)
1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama		<b>8</b>
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda		<b>10</b>
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya		<b>12</b>
4	Analisis Kebijakan Ahli Utama		<b>14</b>